

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara.

Pajak dapat menggerakkan peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat berguna untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa prosedur administrasi pajak sangat berguna dalam kelancaran penerimaan pajak, agar peningkatan dalam sektor pajak dapat terealisasikan dengan baik.

Peran prosedur perhitungan dan pelaporan pajak sangat penting karena prosedur tersebut yang nantinya dapat menjadi penuntun wajib pajak dalam

menjalankan kewajibannya. Namun, dalam prosesnya sendiri banyak kebijakan pemerintah yang ternyata kurang dipahami dan belum dapat dipraktikkan dengan baik oleh masyarakat terutama wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam proses menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Gubernur Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai pemungut PPh pasal 21.

Dengan berbagai paparan yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21. Judul yang penulis angkat yang sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

**“PROSEDUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA BIRO PEREKONOMIAN DI KANTOR GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH”.**

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Tugas Akhir dapat tersusun dengan alur yang baik jika memiliki lingkup permasalahan yang tidak terlalu meluas, adapun lingkup permasalahan itu sendiri yakni:

1. Pengertian Prosedur.
2. Pengertian Pajak.
3. Jenis Pajak.
4. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap Secara Umum.
5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap ber-NPWP Secara Umum.
6. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang menerima penghasilan yang bersifat teratur (tidak termasuk bonus dan THR) serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Biro Perekonomian di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
7. Flowchart Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum yang ada di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan khususnya pada Biro Perekonomian.
2. Mengetahui prosedur perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang menerima penghasilan yang bersifat teratur (tidak termasuk bonus dan THR) pada Biro Perekonomian di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui perbandingan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai pada Biro Perekonomian di Kantor Gubernur Jawa Tengah dengan teori yang didapat pada perkuliahan.

### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

1. Bagi Penulis:

Dapat memperoleh pengetahuan tentang prosedur perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai dalam instansi pemerintah khususnya pada Biro Perekonomian di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Universitas Diponegoro:

Memberikan pengetahuan tambahan bagi para mahasiswa pembaca yang akan menulis Tugas Akhir dengan pengambilan judul yang serupa.

3. Bagi Instansi (Biro Perekonomian di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah):

Penelitian yang telah dipaparkan di Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus tolak ukur atas pelaksanaan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai.

## **1.4 Metode Pengumpulan Data**

Agar dapat memaparkan informasi secara benar dan jelas, dalam Tugas Akhir ini dibutuhkan beberapa metode penelitian yang digunakan, yakni:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek/obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Penulis memperoleh data tersebut langsung dari Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Cara perolehan data tersebut dengan cara:

- Wawancara

Merupakan pencarian data dengan proses Tanya-jawab kepada narasumber. Penulis melakukan tanya jawab dengan para staf karyawan yang khususnya pada Biro Perekonomian di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah mengenai data yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari:

- a. Arsip-arsip dari bagian terkait data yang diperlukan untuk penyusunan penelitian.
- b. Studi Pustaka: yakni pengambilan data dari buku-buku, artikel yang terkait dengan penelitian.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab, yakni sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II            GAMBARAN UMUM BIRO PEREKONOMIAN DI KANTOR GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam bab ini memaparkan tentang sejarah singkat perkembangan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Biro Perekonomian, Visi dan Misi Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Biro Perekonomian, dan Struktur Organisasi dari Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Biro Perekonomian.

## **BAB III            TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini berisikan Pengertian Prosedur, Pengertian Pajak, Jenis Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 Secara Umum, Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Secara Umum, Prosedur Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap ber-NPWP secara umum, Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang menerima penghasilan yang bersifat teratur (tidak termasuk bonus dan THR) serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Biro Perekonomian di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta flowchart atas prosedur perhitungan tersebut.

## **BAB IV            PENUTUP**

Dalam bab ini akan diberikan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya.

